LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 berakhir pada tahun 2029.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679) dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Nganjuk sebagai lembaga teknis Pelaksana Penyelenggara Pemerintah Daerah wajib merumuskan strategi pembangunan, kebijakan umum, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencakup gambaran sesuai dengan misi ke-4 Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut diatas

maka perlu disusun sebuah konsep strategi kebijakan pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

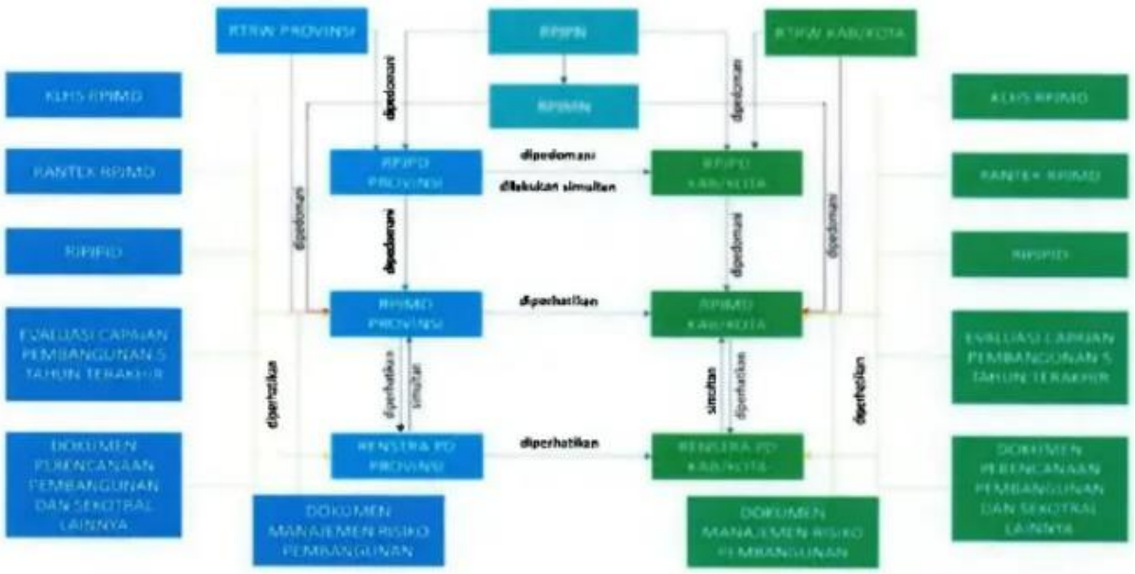
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setia instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi di kabupaten Nganjuk. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk berkewajiban melaksanakan program daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 sebagai breakdown dari visi misi Kepala Daerah, diharapkan dapat memberi hasil yang maksimal khususnya bagi kepentingan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk memperhatikan : (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sampai dengan tahun 2024; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2025 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi:

(1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alur berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat daerah
- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.1.3 Kinerja penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah;
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
2.2.2 Isu Strategis.
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

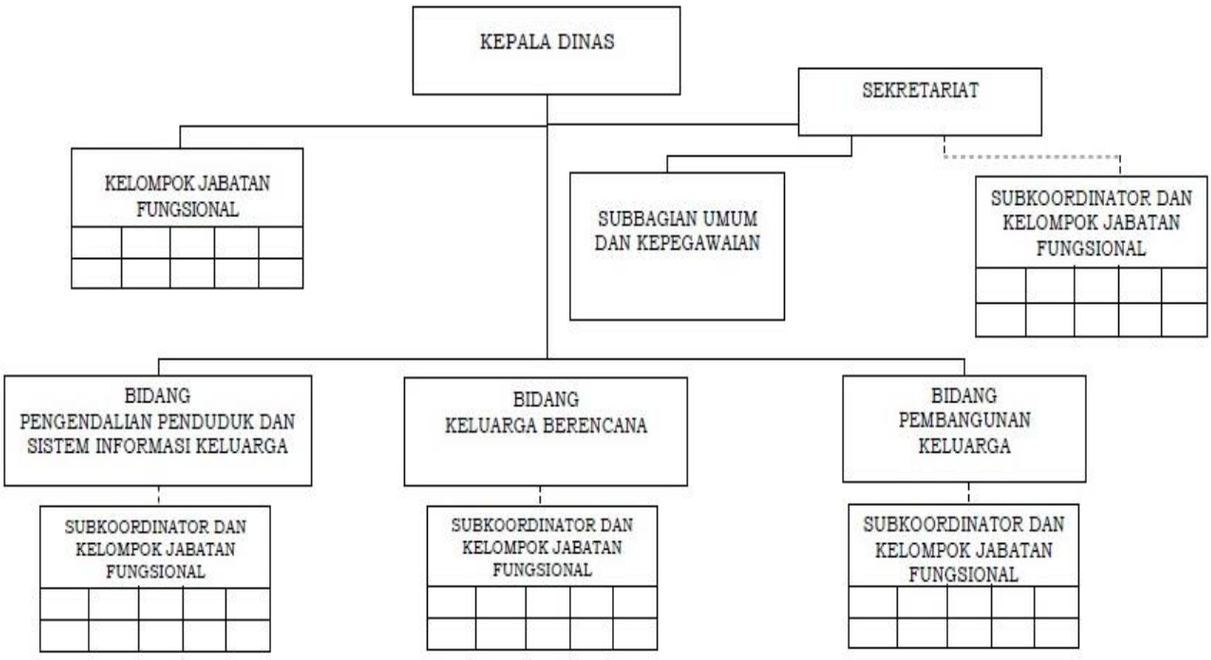
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

2.1.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagai lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Bagan Organisasi Dinas PPKB

I. Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu :

"Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK)"

II. Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis pada Program Pengendalian Penduduk;
c. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
d. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang KKBPK;
g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penggerakan, pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang KKBPK; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

a. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas :

Memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
6. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah;
3. Perumusan kebijakan teknis program pengendalian penduduk;
4. Perencanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
5. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan progam tentang pengendalian penduduk;
6. Perencanaan pelaksanaan pemutakhiran data keluarga;
7. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
8. Pemantauan atas progam dan kegiatan pengendalian penduduk;
9. Perumusan kebijakan teknis yang di integrasikan melalui progam kependudukan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, menganalisis dan menyelenggarakan Program Pembinaan Keluarga Berencana. Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana meliputi penggerakan, Penyediaan alokon pada pelayanan kontrasepsi dan pengayoman pasca pelayanan, Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pada program keluarga berencana;
5. Pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat pendukung program keluarga berencana;
6. Penyusunan strategi program rintisan untuk pelayanan keluarga berencana di wilayah khusus;
7. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB;
8. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah pada program pembinaan KB;
9. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bidang Pembangunan Keluarga

Bidang Pembangunan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi akseptor KB. Bidang Pembangunan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan KS;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan KS;
3. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan

keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

5. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan pemberdayaan dan peningkatan KS;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.1.2.1. Kepegawaian

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai potensi sumber daya manusia yang berasal dari lingkup pemerintah daerah dan pendayagunaan fungsional PKB dari pusat (BKKBN). Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
s.d Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan	Pemda	Penyuluh KB
1.	Pengatur Muda/IIa	-	-
2.	Pengatur Muda Tk.I/IIb	-	-
3.	Pengatur/IIc	1	-
4.	Pengatur Tk.I/IId	1	-
5.	Penata Muda/IIIa	1	-
6.	Penata Muda Tk.I/IIIb	3	17
7.	Penata/IIIc	1	6
8.	Penata Tk.I/IIId	8	17
9.	Pembina/IVa	3	1
10.	Pembina Tk.I/IVb	1	1
11.	Pembina Utama Muda/IVc	1	6
12.	IX (PPPK)	2	-
13.	VII (PPPK)	1	2
14.	V (PPPK)	2	-

No	Pangkat/Golongan	Pemda	Penyuluh KB
Jumlah		**25**	**50**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk masih belum mencukupi dari segi jumlah pegawai, dan dengan beban kerja yang semakin tinggi, jumlah pegawai semakin tahun makin mengalami penurunan.

Dari jumlah Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sejumlah 51, dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 284 desa, setiap 1 PKB/PLKB rata-rata mendapatkan 2 sampai dengan 3 desa/wilayah. Di samping itu jumlah staf yang ada, tidak mencukupi untuk beban pekerjaan yang semakin tinggi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah didukung dengan beberapa sarana dan prasarana diantaranya:

Tabel 2.3
Tabel Sarana Prasarana s.d Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi (Baik, Lengkap, Cukup, Kurang)
	***Sarana Transportasi* :**			
1	Kendaraaan operasional roda 4	Unit	4	Baik
		Unit	1	Kurang Baik
2	Kendaraan operasional roda 2	Unit	31	Baik
		Unit	56	Kurang Baik
	Sarana bangunan gedung:			
3	Bangunan kantor	Lokasi	1	Baik
4	Rumah Negara Gol III	Lokasi	1	Kurang Baik

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi (Baik, Lengkap, Cukup, Kurang)
	Type C Permanen			
5	Bangunan Balai Penyuluh KB	Lokasi	20	Baik
	Sarana alat-alat kantor **:**			
6	Komputer/PC Dinas	Unit	19	Baik
7	Komputer/PC Balai Penyuluh KB	Unit	24	Cukup
8	Laptop Dinas	Unit	11	Baik
	Laptop Dinas	Unit	3	Kurang Baik
9	Laptop Balai Penyuluh KB	Unit	25	Kurang Baik
10	LCD	Unit	17	Baik
11	AC Split	Unit	19	Baik
12	Sound System Dinas	Unit	3	Baik
13	Sound System Balai Penyuluh KB	Unit	7	Kurang Baik

Kelengkapan Sarana dan Prasarana ini diperuntukkan bagi kebutuhan bekerja para personil Dinas PPKB yang ada di sekretariat maupun dilapangan, penggunaan sarana prasarana khususnya laptop diperuntukkan bagi petugas lapangan, dengan harapan mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan para penyuluh KB sehingga aplikasi kegiatan baik dari segi administrasi maupun pelaporan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu.

2.1.2.3. Sumber Daya Lainnya

Adapun sumber daya yang mendukung kinerja pegawai Dinas PPKB dan dibantu oleh beberapa Fasilitas Kesehatan (Faskes) antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

NO	FASKES	KECAMATAN	DESA
1	Puskesmas Bagor	Bagor	Petak
2	Klinik Shafira Nupriyanto	Bagor	Selorejo
3	Klinik Girirejo	Bagor	Girirejo
4	Klinik Almira	Bagor	Karangtengah
5	Klinik Sahabat Keluarga	Bagor	Guyangan
6	Puskesmas Gondang	Gondang	Gondang Kulon
7	Klinik Adi Amerta	Gondang	Balonggebang
8	Klinik Citra Pratama	Gondang	Campur
9	Puskesmas Lengkong	Lengkong	Lengkong
10	Puskesmas Pace	Pace	Pace
11	Klinik Fifa Husada	Pace	PaceKulon
12	Puskesmas Wilangan	Wilangan	Wilangan
13	Puskesmas Ngetos	Ngetos	Ngetos
14	Puskesmas Berbek	Berbek	Berbek
15	Puskesmas Nganjuk	Nganjuk	Begadung
16	RSI Asyisah	Nganjuk	Payaman
17	RSU Nganjuk	Nganjuk	Bogo
18	RS Bhayangkara	Nganjuk	Bogo
19	Klinik DKT	Nganjuk	Mangundikaran
20	Klinik Polres	Nganjuk	Kauman
21	Klinik dr. Nerry	Nganjuk	Werungotok
22	Puskesmas Rejoso	Rejoso	Rejoso
23	Klinik Keluarga Kita	Rejoso	Talang
24	Puskesmas Ngluyu	Ngluyu	Ngluyu
25	Puskesmas Jatikalen	Jatikalen	Jatikalen
26	Puskesmas Patianrowo	Patianrowo	Ngepung
27	Puskesmas Kertosono	Kertosono	Banaran

NO	FASKES	KECAMATAN	DESA
28	RSU Kertosono	Kertosono	Kepuh
29	Klinik PKU Muhammdiyah	Kertosono	Kertosono
30	Puskesmas Baron	Baron	Baron
31	dr. Bima	Baron	Baron
32	Puskesmas Prambon	Prambon	Sanggarahan
33	Klinik Flamboyan	Prambon	Sanggarahan
34	Puskesmas Sukomoro	Sukomoro	Sukomoro
35	Klinik dr. Niha	Sukomoro	Ngrengket
36	Klinik Permata Hati	Sukomoro	Ngrengket
37	Puskesmas Ngronggot	Ngronggot	Ngronggot
38	Klinik Pratama Hikmi Medika	Ngronggot	Ngronggot
39	Puskesmas Loceret	Loceret	Loceret
40	Puskesmas Tanjunganom	Tanjunganom	Warungjayeng
41	Puskesmas Sawahan	Sawahan	Sawahan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan beberapa rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan Pelayanan KB. Tabel diatas menjelaskan tentang gambaran sebaran fasilitas kesehatan yang membantu dalam proses pelayanan KB yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pelayanan yang dapat dilayani oleh pihak rumah sakit adalah untuk pelayanan Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW). Sedangkan pada faskes melayani dalam hal pemasangan IUD, Implan dan suntik.

Secara data dapat dijelaskan bahwa Jumlah fasilitas kesehatan sudah cukup memadai untuk melakukan pelayanan KB. Disamping Faskes diatas, ada salah satu Fasilitas kesehatan mobile yang disebut dengan Mobil pelayanan KB (Muyan KB). Pelayanan KB dengan Mobil Pelayanan KB sering melakukan pelayanan secara rutin ke beberapa Kecamatan dan Desa di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 2.5
Jumlah IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana
Tahun 2025

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KADER		JUMLAH KADER
			IMP BANGGA KENCANA	SUB IMP BANGGA KENCANA	
1	BAGOR	21	21	242	263
2	BARON	11	11	260	271
3	BERBEK	19	19	253	272
4	GONDANG	17	17	198	215
5	JATIKALEN	11	11	139	150
6	KERTOSONO	14	14	198	212
7	LENGKONG	16	16	144	160
8	LOCERET	22	22	344	366
9	NGANJUK	15	15	398	413
10	NGETOS	9	9	127	136
11	NGLUYU	6	6	63	69
12	NGRONGGOT	13	13	252	265
13	PACE	18	18	417	435
14	PATIANROWO	11	11	164	175
15	PRAMBON	14	14	229	243
16	REJOSO	24	24	295	319
17	SAWAHAN	9	9	330	339
18	SUKOMORO	12	12	166	178
19	TANJUNGANOM	16	16	529	545
20	WILANGAN	6	6	128	134
JUMLAH		**284**	**284**	**4.876**	**5.160**

Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (IMP Bangga Kencana) dan Sub IMP Bangga Kencana adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program Keluarga Berencana (KB) di tingkat desa/kelurahan.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Lima tahun terakhir ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk telah melakukan perbaikan. Pencapaian tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK					Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*Total Fertility Rate* (TFR)/ Total Angka Kelahiran	100	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,88	1,83	1,73	1,72	1,52	106,38	109,29	115,61	116,28	131,58
2	*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	100	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	-	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	79,36	78,46	78,17	77,12	73,82	99,19	98,05	97,68	96,35	92,22
3	Prosentase usia nikah pertama di bawah usia 21 tahun	100	-	-	-	-	-	-	11,50	-	-	-	-	7,833	-	-	-	-	146,81	-	-	-	-
4	Prosentase Keluarga Ber-KB yang Mengikuti kelompok Kegiatan	100	-	-	-	-	-	-	-	87,00	88,00	89,00	89,01	-	76,54	81,29	43,69	51,52	-	87,97	92,38	49,09	57,88
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	100	11,70	11,65	11,60	11,50	11,40	-	-	-	-	-	-	9,20	9,66	10,05	7,82	6,42	127,22	120,60	115,42	147,06	177,57

Sumber : Laporan Evaluasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024.

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nganjuk

PROGRAM	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
SEBELUM PERUBAHAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	302.105.904	-	-	-	-	286.562.521	-	-	-	-	94,85	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	279.271.200	-	-	-	-	275.780.100	-	-	-	-	98,75	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.650.000	-	-	-	-	1.650.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.300.000	-	-	-	-	2.300.000	-	-	-	-	69,70	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	-	-	-	-	14.911.000	-	-	-	-	99,41	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Kontrasepsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pendukung Operasional KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Keluarga Berencana	2.213.377.000	-	-	-	-	1.521.649.098	-	-	-	-	68,75	-	-	-	-	-	-
Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	6.383.864.500	-	-	-	-	5.803.024.753,8	-	-	-	-	90,90	-	-	-	-	-	-
Program Ketahanan Keluarga	2.084.557.000	-	-	-	-	1.263.818.400	-	-	-	-	60,63	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**11.283.125.604**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.169.695.872,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**

PROGRAM	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
SESUDAH PERUBAHAN																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	4.230.262.550	5.498.600.160	7.063.239.780	6.629.287.210	-	4.042.537.997,07	5.238.934.903	6.431.319.534	6.271.409.443	-	95,56	95,28	91,05	94,60	0,16	0,16
Program Pengendalian Penduduk	-	103.082.000	298.015.000	1.159.467.350	1.019.311.620	-	92.324.900	293.056.379	989.489.702	957.141.443	-	89,56	98,34	85,34	93,90	1,15	1,18
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-	11.608.338.200	8.121.516.420	14.964.022.300	14.069.620.300	-	8.988.210.158,33	7.968.328.647	14.020.417.909	13.681.350.589	-	77,43	98,11	93,69	97,24	0,07	0,15
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	-	1.223.831.550	5.429.600.750	6.677.747.800	6.534.811.000	-	591.660.600	4.453.240.196	6.516.744.296	6.506.419.781	-	48,34	82,02	97,59	99,57	0,75	1,22
TOTAL	-	**17.165.514.300**	**19.347.732.330**	**29.864.477.230**	**28.253.030.130**	-	**13.714.733.655,40**	**17.953.560.125**	**27.957.971.441**	**27.416.321.256**	-	**79,90**	**92,79**	**93,62**	**97,04**	**0,18**	**0,26**

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.

Kelompok sasaran layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah masyarakat guna tercapainya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dalam pemberian Pelayanan KB dan Pendampingan Keluarga adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, TNI, POLRI, IBI, PKK, Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD).

Dalam upaya pemberian layanan Edukasi terkait Kesehatan Reproduksi dan Kesiapan Pra Nikah Dinas PPKB bermitra dengan Kantor Urusan Agama (KUA).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya partisipasi KB Pria (MOP)	Adanya mitos/ kultur yang negatif terhadap jenis KB MOP	Minimnya pengetahuan laki-laki terhadap informasi Pelayanan KB Pria, dan Kesehatan Reproduksi pasca melakukan KB MOP.
2.	Masih Tingginya ummeet need	Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT) tidak ber-KB perlu pembinaan menjadi Peserta KB	- Karena masalah kesehatan. - Larangan penggunaan kontrasepsi (baik dari suami, keluarga, agama dan masyarakat). - Takut efek samping pasca Pelayanan KB.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Terlalu tua. - Tidak subur. - Kurangnya informasi tentang alat kontrasepsi.
3.	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat terkait KB	Muatan dan Pesan dalam Penyampaian Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masih perlu untuk terus dikembangkan	- Pengembangan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum optimal
4.	Keterlambatan dalam pengumpulan data KB dari Koordinator Wilayah	Adanya keterbatasan daya dukung (Kapasitas SDM dan Kestabilan sistem Informasi Pusat) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	- Kurangnya Kapasitas SDM dan Kestabilan Sistem Informasi Pusat
5.	Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) masih belum optimal	Kurang Optimalnya Integrasi dengan Lintas Sektor terkait Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	- Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan Kampung KB (Keluarga Berkualitas). - Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) - Kurang optimalnya koordinasi antar lintas sektoral.
6.	Kurangnya Pengetahuan terkait Isu-Isu Kependudukan	Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) masih belum optimal	- Kurangnya pengetahuan siswa pada masalah-masalah Kependudukan terutama kualitas penduduk usia Produktif di kalangan remaja.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Kurangnya Kepedulian pada isu kependudukan sehingga belum terbentuk perilaku-perilaku peduli kependudukan mulai dari keluarga.
7.	Masih terdapat Keluarga Beresiko Stunting yang perlu mendapat pendampingan	Masih Tingginya Angka Stunting	- Belum maksimalnya Pendampingan bagi keluarga yang beresiko Stunting. - Kurangnya Asupan gizi dan nutrisi dalam mencukupi kebutuhan anak. - Pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. - Buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal.

2.2.2. Isu Strategis

Meski sudah banyak capaian dan potensi yang dimiliki dalam mendukung terwujudnya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) namun di berbagai bidang masih belum optimal. Permasalahan dan Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasi berkaitan dengan tema yang sedang terjadi. Beberapa permasalahan dan isu strategis dalam pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang menjadi skala prioritas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
-	1. Adanya mitos/kultur yang negatif terhadap jenis KB MOP 2. Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT) tidak ber-KB perlu pembinaan menjadi Peserta KB 3. Muatan dan Pesan dalam Penyampaian Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masih perlu untuk terus dikembangkan 4. Adanya keterbatasan daya dukung (Kapasitas SDM dan Kestabilan sistem Informasi Pusat) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	-	-	-	-	1. Penguatan, Sosialisasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 2. Peningkatan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 3. Optimalisasi Kerjasama dengan BKKBN untuk mendukung Penguatan SDM, Sistem Informasi dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) 4. Peningkatan peran Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Desa serta keterlibatan sektor swasta untuk mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	5. Kurang Optimalnya Integrasi dengan Lintas Sektor terkait Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) 6. Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) masih belum optimal 7. Masih terdapat Keluarga Beresiko Stunting yang perlu mendapat pendampingan					5. Peningkatan peran Organisasi Kemasyarakatan, Sekolah dan Lembaga terkait lainnya untuk mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) 6. Keikutsertaan keluarga terhadap kelompok kegiatan masih rendah 7. Optimalisasi dan integrasi Sistem Satu Data untuk data Stunting dengan Lintas Sektor 8. Optimalisasi pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) untuk meminimalisir terjadinya Stunting baru pada Balita 9. Peningkatan sinergitas dan dukungan Percepatan Penurunan Stunting dengan instansi terkait Pemahaman keluarga terhadap Stunting masih kurang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Berlandasarkan hasil visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya maka perlu adanya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi penduduk untuk membentuk jati dirinya secara profesional dan bertanggung jawab dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi kontrol, dalam pengambilan keputusan, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan.

Secara konseptual tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai simpul jejaring akselerasi kesejahteraan masyarakat, tepatnya pada misi ke-4 yaitu “Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas” yang dijabarkan ke dalam tujuan “Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas”.

Dari tujuan yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran yang mudah terukur dengan rumusan-rumusan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan “Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas”. Dijabarkan dalam Sasaran “Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas”.

TABEL 3.1. TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
- Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)	65,94	65,95	65,96	65,97	65,98	65,99	66,00	
		Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	1,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
			Persentase Keluarga Mandiri (%)	51,52	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,06	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Untuk menyusun strategi pada Renstra Dinas PPKB, berikut kami sajikan Penahapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
1	2	3	4	5
1. Strategi Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk ditekankan pada:				
a. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas	a. Penyusunan rencana aksi dan langkah-langkah operasional yang spesifik untuk mendukung implementasi kebijakan kependudukan, termasuk program-program yang berfokus pada pengendalian jumlah penduduk	a. Identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan kebijakan kependudukan	a. Pelaksanaan pemantauan secara berkala terhadap implementasi kebijakan kependudukan di tingkat daerah untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dengan efektif.	a. Pelaksanaan pengumpulan data kependudukan secara rutin dan penyusunan laporan evaluasi kebijakan.
b. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait	a. Penguatan Kapasitas sektor terkait untuk melaksanakan kebijakan kependudukan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada aparat pemerintahan dan masyarakat setempat.	b. Pelibatan pihak terkait, baik aparat pemerintahan maupun masyarakat dalam proses penyusunan rencana aksi.	b. Peningkatan aksesibilitas informasi terkait kependudukan bagi masyarakat agar dapat lebih mudah diakses dan dipahami.	b. Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan kependudukan secara menyeluruh.
c. Pemanfaatan parameter kependudukan oleh pemangku kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan	a. Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebijakan kependudukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa, seminar, dan lokakarya.	c. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kependudukan, seperti pusat data kependudukan dan sistem informasi berbasis teknologi.	c. Pelibatan media massa, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal dalam menyebarluaskan informasi terkait kebijakan kependudukan.	c. Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian kebijakan apabila diperlukan untuk mengatasi hambatan atau kekurangan dalam implementasi.
d. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah	a. Penyusunan Kebijakan Perbaikan Berdasarkan Hasil Evaluasi kependudukan, termasuk penyesuaian terhadap dinamika demografis yang terjadi.	d. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam implementasi kebijakan kependudukan	d. Penyelenggaraan forum atau diskusi terbuka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai topik kependudukan.	d. Evaluasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah

2. Strategi Revitalisasi Program KB :				
a. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB	a. Peningkatan Akses dan Penyuluhan kepada Masyarakat terkait program KB	a. Peningkatan Akses dan Jangkauan Layanan KB ke daerah yang sulit dijangkau	a. Penguatan kerjasama antara sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan kontrasepsi dan pengurangan angka kelahiran yang tidak diinginkan.	a. Penyusunan materi kampanye yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal setempat agar lebih mudah diterima oleh masyarakat.
b. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam program KKB	b. Penyusunan Program Kerja yang Relevan dan Terintegrasi dengan program pembangunan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.	b. Pemantauan tersedianya metode kontrasepsi yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat	b. Pelaksanaan kampanye yang menyasar kelompok-kelompok sasaran tertentu (misalnya remaja, pasangan usia subur, atau pasangan baru menikah) melalui media massa, media sosial, dan acara-acara komunitas.	b. Penguatan Program Dukungan bagi Pasangan Usia Subur (PUS)
c. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk	c. Pelatihan dan pendampingan lebih lanjut bagi masyarakat mengenai berbagai metode kontrasepsi, serta pemberian pengetahuan mengenai manfaat jangka panjang dari KB	c. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KB	c. Meningkatkan Partisipasi Laki-Laki dalam Perencanaan Keluarga dan keikutsertaan KB	c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak dari kampanye sosial yang telah dilaksanakan.
d. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi	d. Penguatan kerja sama antara kader KB dengan instansi terkait, seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat.	d. pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program KB untuk menilai pencapaian tujuan, efektivitas layanan, dan kepuasan aksptor.	d. Penyelenggaraan Penyuluhan Terpadu dan Pengikutsertaan pelatihan multi-sektor bagi kader dan tenaga penyuluh lapangan	d. Pemberian penghargaan atau pengakuan kepada keluarga dan komunitas yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip KKBPK dengan baik
e. Pelatihan penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB	e. Pelaksanaan pemantauan secara berkala untuk mengetahui efektivitas program KB yang dijalankan.	e. Pengembangan kebijakan yang mendukung penyediaan layanan KB secara inklusif dan berkelanjutan	e. Peningkatan Infrastruktur dan Akses Layanan di Kampung KB	e. Pemberian Sosialisasi Layanan KB Medis Operasi kepada Masyarakat
f. Peningkatan kualitas manajemen program dan	f. Pelaksanaan advokasi dengan stakeholder terkait	f. Pemberian fasilitas khusus bagi daerah-daerah dengan tingkat	f. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap integrasi lintas	f. Peningkatan Keterjangkauan dan Akses Layanan KB Medis

kegiatan	untuk penguatan sistem kesehatan keuarga akseptor KB	partisipasi KB yang rendah	sektor di Kampung KB	
g. Mempertahankan total angka kelahiran (TFR) pada kisaran angka 2	g. Mempertahankan total angka kelahiran (TFR) pada kisaran angka 2	g. Mempertahankan total angka kelahiran (TFR) pada kisaran angka 2	g. Mempertahankan total angka kelahiran (TFR) pada kisaran angka 2	g. Mempertahankan total angka kelahiran (TFR) pada kisaran angka 2
h. Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)	h. Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)	h. Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)	h. Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)	h. Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)
i. Meningkatkan Pembinaan dan Kompetensi Kader KB	i. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan yang mendukung pelaksanaan KB, seperti layanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan.	i. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung program KB, dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan pemangku kepentingan lainnya.	i. Peningkatan Kesadaran dan Kampanye Sosial tentang pentingnya program KKBPK di Kampung KB.	i. Peningkatan fasilitasi Konseling Pra dan Pasca Pelayanan/ Tindakan Operasi KB
3. Strategi Penggerakan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :				
a. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen yang mendukung pencapaian target kelompok	a. Pemetaan dan Analisis Kebutuhan Berdasarkan Segmentasi (kelompok usia, jenis kelamin, kondisi ekonomi, status perkawinan, dll.) dalam kelompok Tribina dan UPPKA.	a. Penyusunan Modul Pembelajaran dan Materi Edukasi yang Relevan terkait program generasi berencana.	a. Pelatihan Kader dan Fasilitator untuk Penyuluhan Remaja	a. Penyuluhan Interaktif dan Kegiatan Sosialisasi Remaja terkait program generasi berencana.
b. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga	b. Pengembangan Modul dan Materi Khusus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.	b. Penyelenggaraan kampanye sosial yang melibatkan komunitas remaja untuk menyebarkan pesan-pesan pendewasaan usia perkawinan.	b. Penyediaan Akses Layanan Konseling Reproduksi untuk Remaja	b. Pelatiahan berkelanjutan terhadap usaha peningkatan pendapatan ekonomi keluarga.

c. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain untuk menunjang peningkatan ketahanan keluarga	c. Pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada kader dan fasilitator yang bekerja langsung dengan kelompok Tribina dan UPPKA.	c. Pengembangan Jaringan Orang Tua Hebat melalui diskusi dan forum komunikasi.	c. Optimalisasi layanan kesejahteraan keluarga dan PUP melalui platform digital	c. Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian kebijakan apabila diperlukan untuk mengatasi hambatan atau kekurangan dalam implementasi.
d. Merevitalisasi program-program terpadu lintas sektor di tingkat lini lapangan untuk menunjang program	d. Pengoptimalan Kolaborasi dengan Lintas Sektor	d. Peningkatan Keterampilan Pengasuhan melalui Simulasi dan Role-Playing yang dilaksanakan pada poktan-poktan	d. Pemantauan dan evaluasi keberhasilan program-program pembangunan keluarga	d. Peningkatan kerjasama dan evalusasi bersama dengan stakeholder dan mitra kerja

Berdasarkan tabel penahapan Renstra, maka dapat dirumuskan bersama tentang strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PPKB pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Menurut stragei yang telah disusun, berikut adalah prioritas pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 :

1. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan KB sesuai standar SOP.
4. Meningkatkan kesertaan ber KB.
5. Meningkatkan kualitas petugas KB.
6. Penguatan program pembangunan keluarga berkualitas.
7. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang bekerjasama dengan Kemenag dan Dinas Pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah maka perlu disusun arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Perangkat Daerah

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket.
1.	1) **Penyusunan Kebijakan dan Rencana:** Merumuskan kebijakan teknis dan menyusun rencana strategis (RENSTRA) serta rencana kerja (RENJA) di bidang pengendalian penduduk dan KB. 2) **Pelaksanaan Program:** Menerapkan pedoman dan standar teknis dalam berbagai kegiatan, seperti program keluarga berencana, pengelolaan alat kontrasepsi, dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi). 3) **Pembinaan dan Bimbingan Teknis:** Memberikan arahan, petunjuk teknis, serta membina dan memotivasi bawahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan	**Tahun 2025 : Penguatan Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah.** Peningkatan kualitas SDM, Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Peningkatan Jaminan Sosial dan peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan merupakan pondasi percepatan pembangunan daerah yang harus dipenuhi di tahun pertama pemerintahan. Penguatan terhadap unsur pondasi pembangunan tersebut memiliki peran strategis (Leverage), karena berpengaruh besar terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi tahapan pembangunan selanjutnya.	**Tahun 2025 :** • Penyerasian kebijakan bidang pengendalian penduduk : Perumusan kebijakan terkait kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas yang disepakati semua sektor terkait. • Revitalisasi Program KB : Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB untuk mempertahankan total angka kelahiran (TFR) pada kisaran angka 2. • Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : Meningkatkan advokasi serta koordinasi dengan program-	

	NSPK yang ada. 4) **Pengawasan dan Monitoring:** Melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai dengan standar dan mencapai tujuan yang ditetapkan.		program lain untuk menunjang peningkatan ketahanan keluarga	
	5) **Sinkronisasi dan Koordinasi:** Memadukan dan menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan memastikan sinergi antar lembaga. 6) **Pengembangan Jaringan Informasi dan Data:** Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan data serta jaringan informasi kependudukan, seperti melalui sistem informasi peringatan dini yang disebut Siperindu.	**Tahun 2026 : Pengelolaan Sektor Strategis Daerah.** Sektor stratgis daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi meliputi sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor industri. Pada sisi lain, Usaha Mikro, Koperasi dan Ekonomi Digital serta pariwisata daerah merupakan fokus pembangunan daerah, yang dikembangkan secara simultan dengan sektor strategis di atas. Pemanfaatan sumberdaya (Internal resources) pembangunan secara terfokus pada sektor strategis merupakan langkah efektif dalam pembangunan.	**Tahun 2026 :** • Penyerasian kebijakan bidang pengendalian penduduk : Penyusunan rencana aksi dan langkah-langkah operasional yang spesifik untuk mendukung implementasi kebijakan kependudukan, termasuk program-program yang berfokus pada pengendalian jumlah penduduk • Revitalisasi Program KB : Menyusun program kerja yang relevan dengan peningkatan Akses dan Penyuluhan kepada	

			Masyarakat terkait program KB • Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : Pemetaan dan Analisis Kebutuhan Berdasarkan Segmentasi (kelompok usia, jenis kelamin, kondisi ekonomi, status perkawinan, dll.) dalam kelompok Tribina dan UPPKA dalam upaya pengembangan Modul dan Materi Khusus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.	
		Tahun 2027 : Akselerasi Pembangunan Sektoral. Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu wilayah pengembangan komodtas agroindustri dan minapolitan, serta pariwisata, sangat membutuhkan dukungan berbagai sumberdaya dari mitra strategis. Kerjasama strategis hexahelic mendorong percepatan	**Tahun 2027 :** • Penyerasian kebijakan bidang pengendalian penduduk : Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kependudukan, seperti pusat data kependudukan dan sistem informasi berbasis	

		pembangunan sektoral dan spasial lebih efektif. Pada sisi lain, pelibatan stakeholder pembangunan ini juga akan diarahkan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan perluasan lapangan kerja.	teknologi. • Revitalisasi Program KB : Peningkatan Akses dan Jangkauan Layanan KB ke daerah yang sulit dijangkau. • Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : Penyelenggaraan kampanye sosial yang melibatkan komunitas untuk menyebarkan pesan-pesan pendewasaan usia perkawinan, menjadi orang tua hebat, serta keterampilan pengasuhan.	
		Tahun 2028 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahap ini merupakan perwujudan Visi RPJMS yang ditandai kemajuan di berbagai bidang, antara lain pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif yang telah terintegrasi dengan dengan sektor	**Tahun 2028 :** • Penyerasian kebijakan bidang pengendalian penduduk : pemantauan secara berkala terhadap implementasi kebijakan kependudukan di tingkat daerah untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan	

		primer pertanian. Tahap ini juga ditandai kapasitas SDM yang berkarakter, layanan infrastruktur merata dan berkualitas serta pendapatan perkapita yang tumbuh signifikan. Kondisi ini mendorong terjadinya aglomerasi industri dan perdagangan yang semakin massif dari daerah sekitar dengan pelaku usaha / masyarakat Kabpaten Nganjuk.	dengan efektif. • Revitalisasi Program KB : Penguatan kerjasama antara sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan kontrasepsi dan pengurangan angka kelahiran yang tidak diinginkan. • Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : Optimalisasi layanan kesejahteraan keluarga dan PUP melalui platform digital serta pemantauan dan evaluasi keberhasilan program-program pembangunan keluarga.	
		Tahun 2029 : Pemantapan Transformasi Pembangunan. Pada tahap ini merupakan periodesasi	**Tahun 2029 :** • Penyerasian kebijakan bidang pengendalian penduduk :	

		Kepala Daerah Baru, yang dijabarkan sesuai dengan Visi-Misi Pembangunan jangka menengah tahun 2030-2035.	Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian kebijakan apabila diperlukan untuk mengatasi hambatan atau kekurangan dalam implementasi. • Revitalisasi Program KB : Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak dari kampanye sosial yang telah dilaksanakan. • Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian kebijakan apabila diperlukan untuk mengatasi hambatan atau kekurangan dalam implementasi.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif.

Untuk mencapai sasaran “Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas” ditetapkan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Adapun program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Adapun rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator program (outcome), indikator kegiatan (output) dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
- Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas				Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)		
		Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)		
					Persentase keluarga mandiri (%)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.14.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.14.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.14.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.14.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.14.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.14.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.14.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.14.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.14.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.14.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.14.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.14.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.14.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.14.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.14.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.14.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.14.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.14.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Menurunnya kelahiran Pasangan Usia Subur pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Meningkatnya Pembinaan Kependudukan bagi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi berkelanjutan (Kampung KB)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
					Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan KB		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Layanan KB	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Meningkatnya Pengetahuan Program Bangga Kencana bagi Kader IMP dan Sub IMP	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Layanan KB	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Layanan KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Pengetahuan Orang Tua dalam Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak		Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Promosi dan Sosialisasi Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Promosi dan Sosialisasi Bina Keluarga Balita (BKB)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			Terwujudnya Edukasi Keluarga yang memiliki Remaja		Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Promosi, Sosialisasi dan Konseling Kesehatan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Lansia		Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Promosi dan sosialisasi Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		Persentase Keluarga akseptor yang Memiliki Usaha Ekonomi produktif (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terlaksananya Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) bagi Kelompok Kegiatan	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					32.231.203.125		33.906.565.047		35.606.893.300		37.391.237.969		39.263.799.861	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.582.408.000		10.061.528.400		10.564.604.820		11.092.835.061		11.647.476.814	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,50	84,00	82,00	9.582.408.000	83,00	10.061.528.400	84,00	10.564.604.820	85,00	11.092.835.061	86,00	11.647.476.814	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.309.371.250		1.374.839.813		1.443.581.804		1.515.760.894		1.591.548.938	
Menurunnya kelahiran Pasangan Usia Subur pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	42,05	40	39	1.309.371.250	38	1.374.839.813	37	1.443.581.804	36	1.515.760.894	35	1.591.548.938	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					13.382.034.375		14.114.937.859		14.825.684.752		15.570.968.992		16.352.517.438	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	73,82	80,06	80,07	13.382.034.375	80,08	14.114.937.859	80,09	14.825.684.752	80,10	15.570.968.992	80,11	16.352.517.438	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					7.957.389.500		8.355.258.975		8.773.021.924		9.211.673.022		9.672.256.671	
Meningkatnya Pengetahuan Orang Tua dalam Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) (%)	53,80	54,00	55,00	6.234.637.500	55,10	6.546.369.375	55,20	6.873.687.844	55,30	7.217.372.236	55,40	7.578.240.848	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Edukasi Keluarga yang memiliki Remaja	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) (%)	84,09	85,31	86,44	420.500.000	87,48	441.525.000	88,44	463.601.250	89,33	486.781.313	90,44	511.120.378	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Lansia	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	58,06	59,37	59,88	847.000.000	60,39	889.350.000	60,89	933.817.500	61,39	980.508.376	61,89	1.029.533.794	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase Keluarga akseptor yang Memiliki Usaha Ekonomi produktif (%)	83,62	84,00	85,00	455.252.000	85,10	478.014.600	85,20	501.915.330	85,30	527.011.097	85,40	553.361.651	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TOTAL KESELURUHAN					32.231.203.125		33.906.565.047		35.606.893.300		37.391.237.969		39.263.799.861	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				32.231.203.125,00		33.906.565.047,00		35.606.893.300,00		37.391.237.969,00		39.263.799.861,00		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.582.408.000,00		10.061.528.400,00		10.564.604.820,00		11.092.835.061,00		11.647.476.814,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80.50	82.00	9.582.408.000,00	83.00	10.061.528.400,00	84.00	10.564.604.820,00	85.00	11.092.835.061,00	86.00	11.647.476.814,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.129.500,00		19.035.975,00		19.987.774,00		20.987.163,00		22.036.521,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	18.129.500,00	4	19.035.975,00	4	19.987.774,00	4	20.987.163,00	4	22.036.521,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3		3		3		3		3			
2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.400.000,00		4.620.000,00		4.851.000,00		5.093.550,00		5.348.228,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	4.400.000,00	3	4.620.000,00	3	4.851.000,00	3	5.093.550,00	3	5.348.228,00		
2.14.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.715.000,00		4.950.750,00		5.198.288,00		5.458.202,00		5.731.112,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4	4.715.000,00	4	4.950.750,00	4	5.198.288,00	4	5.458.202,00	4	5.731.112,00		
2.14.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.014.500,00		9.465.225,00		9.938.486,00		10.435.411,00		10.957.181,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	9.014.500,00	4	9.465.225,00	4	9.938.486,00	4	10.435.411,00	4	10.957.181,00		
2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.924.273.500,00		5.170.487.175,00		5.429.011.534,00		5.700.462.111,00		5.985.485.212,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	31	4.916.893.500,00	31	5.162.738.175,00	31	5.420.875.084,00	31	5.691.918.838,00	31	5.976.514.780,00		
2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.916.893.500,00		5.162.738.175,00		5.420.875.084,00		5.691.918.838,00		5.976.514.780,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	31	4.916.893.500,00	31	5.162.738.175,00	31	5.420.875.084,00	31	5.691.918.838,00	31	5.976.514.780,00		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	5	7.380.000,00	5	7.749.000,00	5	8.136.450,00	5	8.543.273,00	5	8.970.432,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4		4		4		4		4			
2.14.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.880.000,00		4.074.000,00		4.277.700,00		4.491.585,00		4.716.160,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4	3.880.000,00	4	4.074.000,00	4	4.277.700,00	4	4.491.585,00	4	4.716.160,00		
2.14.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.500.000,00		3.675.000,00		3.858.750,00		4.051.688,00		4.254.272,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	5	3.500.000,00	5	3.675.000,00	5	3.858.750,00	5	4.051.688,00	5	4.254.272,00		
2.14.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				167.500.000,00		175.875.000,00		184.668.750,00		193.902.188,00		203.597.297,00		
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31	31	167.500.000,00	31	175.875.000,00	31	184.668.750,00	31	193.902.188,00	31	203.597.297,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1		1		1		1		1			
2.14.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				27.500.000,00		28.875.000,00		30.318.750,00		31.834.688,00		33.426.422,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	27.500.000,00	1	28.875.000,00	1	30.318.750,00	1	31.834.688,00	1	33.426.422,00		
2.14.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				140.000.000,00		147.000.000,00		154.350.000,00		162.067.500,00		170.170.875,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31	31	140.000.000,00	31	147.000.000,00	31	154.350.000,00	31	162.067.500,00	31	170.170.875,00		
2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				745.980.000,00		783.279.000,00		822.442.950,00		863.565.099,00		906.743.354,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	12	428.000.000,00	12	449.400.000,00	12	471.870.000,00	12	495.463.500,00	12	520.236.676,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	12		12		12		12		12			
2.14.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000,00		6.300.000,00		6.615.000,00		6.945.750,00		7.293.038,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12	6.000.000,00	12	6.300.000,00	12	6.615.000,00	12	6.945.750,00	12	7.293.038,00		
2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				350.000.000,00		367.500.000,00		385.875.000,00		405.168.750,00		425.427.188,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	12	350.000.000,00	12	367.500.000,00	12	385.875.000,00	12	405.168.750,00	12	425.427.188,00		
2.14.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				72.000.000,00		75.600.000,00		79.380.000,00		83.349.000,00		87.516.450,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	12	72.000.000,00	12	75.600.000,00	12	79.380.000,00	12	83.349.000,00	12	87.516.450,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11	11	317.980.000,00	11	333.879.000,00	11	350.572.950,00	11	368.101.599,00	11	386.506.678,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	12		12		12		12		12			
2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.500.000,00		13.125.000,00		13.781.250,00		14.470.313,00		15.193.828,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	12	12.500.000,00	12	13.125.000,00	12	13.781.250,00	12	14.470.313,00	12	15.193.828,00		
2.14.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.780.000,00		9.219.000,00		9.679.950,00		10.163.948,00		10.672.145,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	8.780.000,00	4	9.219.000,00	4	9.679.950,00	4	10.163.948,00	4	10.672.145,00		
2.14.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.200.000,00		13.860.000,00		14.553.000,00		15.280.650,00		16.044.683,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11	11	13.200.000,00	11	13.860.000,00	11	14.553.000,00	11	15.280.650,00	11	16.044.683,00		
2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				280.000.000,00		294.000.000,00		308.700.000,00		324.135.000,00		340.341.750,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	280.000.000,00	12	294.000.000,00	12	308.700.000,00	12	324.135.000,00	12	340.341.750,00		
2.14.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.500.000,00		3.675.000,00		3.858.750,00		4.051.688,00		4.254.272,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	3.500.000,00	2	3.675.000,00	2	3.858.750,00	2	4.051.688,00	2	4.254.272,00		
2.14.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.488.375.000,00		1.562.793.750,00		1.640.933.438,00		1.722.980.109,00		1.809.129.115,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	1.488.375.000,00	1	1.562.793.750,00	1	1.640.933.438,00	1	1.722.980.109,00	1	1.809.129.115,00		
2.14.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.488.375.000,00		1.562.793.750,00		1.640.933.438,00		1.722.980.109,00		1.809.129.115,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	1.488.375.000,00	1	1.562.793.750,00	1	1.640.933.438,00	1	1.722.980.109,00	1	1.809.129.115,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.010.000.000,00		1.060.500.000,00		1.113.525.000,00		1.169.201.250,00		1.227.661.313,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.010.000.000,00	12	1.060.500.000,00	12	1.113.525.000,00	12	1.169.201.250,00	12	1.227.661.313,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12		12		12		12		12			
2.14.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00		
2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.000.000,00		147.000.000,00		154.350.000,00		162.067.500,00		170.170.875,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	140.000.000,00	12	147.000.000,00	12	154.350.000,00	12	162.067.500,00	12	170.170.875,00		
2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				855.000.000,00		897.750.000,00		942.637.500,00		989.769.375,00		1.039.257.844,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	855.000.000,00	12	897.750.000,00	12	942.637.500,00	12	989.769.375,00	12	1.039.257.844,00		
2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.228.150.000,00		1.289.557.500,00		1.354.035.374,00		1.421.737.141,00		1.492.824.002,00		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1.228.150.000,00	1	1.289.557.500,00	1	1.354.035.374,00	1	1.421.737.141,00	1	1.492.824.002,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	20		20		20		20		20			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	92		92		92		92		92			
2.14.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				195.500.000,00		205.275.000,00		215.538.750,00		226.315.688,00		237.631.472,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	92	195.500.000,00	92	205.275.000,00	92	215.538.750,00	92	226.315.688,00	92	237.631.472,00		
2.14.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				82.650.000,00		86.782.500,00		91.121.625,00		95.677.706,00		100.461.592,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	20	82.650.000,00	20	86.782.500,00	20	91.121.625,00	20	95.677.706,00	20	100.461.592,00		
2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				950.000.000,00		997.500.000,00		1.047.374.999,00		1.099.743.747,00		1.154.730.938,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	950.000.000,00	1	997.500.000,00	1	1.047.374.999,00	1	1.099.743.747,00	1	1.154.730.938,00		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				1.309.371.250,00		1.374.839.813,00		1.443.581.804,00		1.515.760.894,00		1.591.548.938,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya kelahiran Pasangan Usia Subur pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	42.05	39	1.309.371.250,00	38	1.374.839.813,00	37	1.443.581.804,00	36	1.515.760.894,00	35	1.591.548.938,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				292.165.000,00		306.773.250,00		322.111.913,00		338.217.508,00		355.128.384,00		
Meningkatnya Pembinaan Kependudukan bagi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	3	7	292.165.000,00	7	306.773.250,00	7	322.111.913,00	7	338.217.508,00	7	355.128.384,00		
	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0	7		7		7		7					
	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	3	7		7		7		7		7			
2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				18.165.000,00		19.073.250,00		20.026.913,00		21.028.258,00		22.079.671,00		
Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	3	7	18.165.000,00	7	19.073.250,00	7	20.026.913,00	7	21.028.258,00	7	22.079.671,00		
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		121.550.625,00		
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	3	7	85.000.000,00	7	90.000.000,00	7	95.000.000,00	7	100.000.000,00	7	105.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				89.000.000,00		92.700.000,00		96.835.000,00		101.426.750,00		106.498.088,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0	7	89.000.000,00	7	92.700.000,00	7	96.835.000,00	7	101.426.750,00		106.498.088,00		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.017.206.250,00		1.068.066.563,00		1.121.469.891,00		1.177.543.386,00		1.236.420.554,00		
Terwujudnya Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi berkelanjutan (Kampung KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0	1	1.017.206.250,00	1	1.068.066.563,00	1	1.121.469.891,00	1	1.177.543.386,00	1	1.236.420.554,00		
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	12		12		12		12		12			
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				165.500.000,00		173.775.000,00		182.463.750,00		191.586.938,00		201.166.284,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	12	165.500.000,00	12	173.775.000,00	12	182.463.750,00	12	191.586.938,00	12	201.166.284,00		
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				201.206.250,00		211.266.563,00		221.829.891,00		232.921.385,00		244.567.454,00		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	12	201.206.250,00	12	211.266.563,00	12	221.829.891,00	12	232.921.385,00	12	244.567.454,00		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				310.000.000,00		325.500.000,00		341.775.000,00		358.863.750,00		376.806.938,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	12	310.000.000,00	12	325.500.000,00	12	341.775.000,00	12	358.863.750,00	12	376.806.938,00		
2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana				165.500.000,00		173.775.000,00		182.463.750,00		191.586.938,00		201.166.284,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	0	12	165.500.000,00	12	173.775.000,00	12	182.463.750,00	12	191.586.938,00	12	201.166.284,00		
2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan				100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		121.550.625,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	0	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00		
2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				75.000.000,00		78.750.000,00		82.687.500,00		86.821.875,00		91.162.969,00		
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0	1	75.000.000,00	1	78.750.000,00	1	82.687.500,00	1	86.821.875,00	1	91.162.969,00		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				13.382.034.375,00		14.114.937.859,00		14.825.684.752,00		15.570.968.992,00		16.352.517.438,00		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	73.82	80.07	13.382.034.375,00	80.08	14.114.937.859,00	80.09	14.825.684.752,00	80.10	15.570.968.992,00	80.11	16.352.517.438,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				2.217.665.000,00		2.328.548.250,00		2.444.975.663,00		2.567.224.447,00		2.695.585.667,00		
Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Layanan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	20	12	2.217.665.000,00	12	2.328.548.250,00	12	2.444.975.663,00	12	2.567.224.447,00	12	2.695.585.667,00		
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	12		12		12		12		12			
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				181.500.000,00		190.575.000,00		200.103.750,00		210.108.938,00		220.614.384,00		
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	20	12	181.500.000,00	12	190.575.000,00	12	200.103.750,00	12	210.108.938,00	12	220.614.384,00		
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				1.053.990.000,00		1.106.689.500,00		1.162.023.975,00		1.220.125.174,00		1.281.131.432,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	12	1.053.990.000,00	12	1.106.689.500,00	12	1.162.023.975,00	12	1.220.125.174,00	12	1.281.131.432,00		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				330.750.000,00		347.287.500,00		364.651.875,00		382.884.469,00		402.028.692,00		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20	20	330.750.000,00	20	347.287.500,00	20	364.651.875,00	20	382.884.469,00	20	402.028.692,00		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				375.800.000,00		394.590.000,00		414.319.500,00		435.035.475,00		456.787.249,00		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6	12	375.800.000,00	12	394.590.000,00	12	414.319.500,00	12	435.035.475,00	12	456.787.249,00		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				275.625.000,00		289.406.250,00		303.876.563,00		319.070.391,00		335.023.910,00		
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5	10	275.625.000,00	10	289.406.250,00	10	303.876.563,00	10	319.070.391,00	10	335.023.910,00		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				9.369.536.000,00		9.901.814.565,00		10.401.905.293,00		10.926.000.558,00		11.475.300.585,00		
Meningkatnya Pengetahuan Program Bangga Kencana bagi Kader IMP dan Sub IMP	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0	20	9.369.536.000,00	20	9.901.814.565,00	20	10.401.905.293,00	20	10.926.000.558,00	20	11.475.300.585,00		
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160	5160		5160		5160		5160		5160			
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0	12		12		12		12		12			
2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				280.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		340.000.000,00		360.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0	20	280.000.000,00	20	300.000.000,00	20	320.000.000,00	20	340.000.000,00	20	360.000.000,00		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				7.988.550.000,00		8.387.977.500,00		8.807.376.375,00		9.247.745.194,00		9.710.132.453,00		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160	5160	7.988.550.000,00	5160	8.387.977.500,00	5160	8.807.376.375,00	5160	9.247.745.194,00	5160	9.710.132.453,00		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1.100.986.000,00		1.213.837.065,00		1.274.528.918,00		1.338.255.364,00		1.405.168.132,00		
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0	12	1.100.986.000,00	12	1.213.837.065,00	12	1.274.528.918,00	12	1.338.255.364,00	12	1.405.168.132,00		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				1.064.699.000,00		1.117.933.950,00		1.173.830.648,00		1.232.522.181,00		1.294.148.289,00		
Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Layanan KB	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	12	1.064.699.000,00	12	1.117.933.950,00	12	1.173.830.648,00	12	1.232.522.181,00	12	1.294.148.289,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	138630	150000		150500		151000		151500		152000			
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				18.100.000,00		19.005.000,00		19.955.250,00		20.953.013,00		22.000.663,00		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	12	18.100.000,00	12	19.005.000,00	12	19.955.250,00	12	20.953.013,00	12	22.000.663,00		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				991.500.000,00		1.041.075.000,00		1.093.128.750,00		1.147.785.188,00		1.205.174.447,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	138630	150000	991.500.000,00	150500	1.041.075.000,00	151000	1.093.128.750,00	151500	1.147.785.188,00	152000	1.205.174.447,00		
2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				15.850.000,00		16.642.500,00		17.474.625,00		18.348.356,00		19.265.774,00		
Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	0	2	15.850.000,00	2	16.642.500,00	2	17.474.625,00	2	18.348.356,00	2	19.265.774,00		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				39.249.000,00		41.211.450,00		43.272.023,00		45.435.624,00		47.707.405,00		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20	12	39.249.000,00	12	41.211.450,00	12	43.272.023,00	12	45.435.624,00	12	47.707.405,00		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				730.134.375,00		766.641.094,00		804.973.148,00		845.221.806,00		887.482.897,00		
Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Layanan KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	284	284	730.134.375,00	284	766.641.094,00	284	804.973.148,00	284	845.221.806,00	284	887.482.897,00		
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	284	284		284		284		284		284			
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				726.000.000,00		762.300.000,00		800.415.000,00		840.435.750,00		882.457.538,00		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	284	284	726.000.000,00	284	762.300.000,00	284	800.415.000,00	284	840.435.750,00	284	882.457.538,00		
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				4.134.375,00		4.341.094,00		4.558.148,00		4.786.056,00		5.025.359,00		
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	284	284	4.134.375,00	284	4.341.094,00	284	4.558.148,00	284	4.786.056,00	284	5.025.359,00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				7.957.389.500,00		8.355.258.975,00		8.773.021.924,00		9.211.673.022,00		9.672.256.671,00		
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase Keluarga akseptor yang Memiliki Usaha Ekonomi produktif	83.62	85.00	455.252.000,00	85.10	478.014.600,00	85.20	501.915.330,00	85.30	527.011.097,00	85.40	553.361.651,00	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2.053.502.000,00		2.156.177.100,00		2.263.985.955,00		2.377.185.255,00		2.496.044.515,00		
Terlaksananya Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) bagi Kelompok Kegiatan	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3	3	455.252.000,00	3	478.014.600,00	3	501.915.330,00	3	527.011.097,00	3	553.361.651,00		
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20	50		50		50		50		50			
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				31.752.000,00		33.339.600,00		35.006.580,00		36.756.909,00		38.594.754,00		
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3	3	31.752.000,00	3	33.339.600,00	3	35.006.580,00	3	36.756.909,00	3	38.594.754,00		
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				423.500.000,00		444.675.000,00		466.908.750,00		490.254.188,00		514.766.897,00		
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20	50	423.500.000,00	50	444.675.000,00	50	466.908.750,00	50	490.254.188,00	50	514.766.897,00		
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Lansia	Indeks Lansia Berdaya	58.06	59.88	847.000.000,00	60.39	889.350.000,00	60.89	933.817.500,00	61.39	980.508.376,00	61.89	1.029.533.794,00		
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2.053.502.000,00		2.156.177.100,00		2.263.985.955,00		2.377.185.255,00		2.496.044.515,00		
Promosi dan sosialisasi Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	33339	847.000.000,00	33339	889.350.000,00	33339	933.817.500,00	33339	980.508.376,00	33339	1.029.533.794,00		
2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				847.000.000,00		889.350.000,00		933.817.500,00		980.508.376,00		1.029.533.794,00		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	33339	847.000.000,00	33339	889.350.000,00	33339	933.817.500,00	33339	980.508.376,00	33339	1.029.533.794,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengetahuan Orang Tua dalam Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)	53.8	55	6.234.637.500,00	55.10	6.546.369.375,00	55.20	6.873.687.844,00	55.30	7.217.372.236,00	55.40	7.578.240.848,00		
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2.053.502.000,00		2.156.177.100,00		2.263.985.955,00		2.377.185.255,00		2.496.044.515,00		
Promosi dan Sosialisasi Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	40	30	330.750.000,00	30	347.287.500,00	30	364.651.875,00	30	382.884.469,00	30	402.028.692,00		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				330.750.000,00		347.287.500,00		364.651.875,00		382.884.469,00		402.028.692,00		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	40	30	330.750.000,00	30	347.287.500,00	30	364.651.875,00	30	382.884.469,00	30	402.028.692,00		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				5.903.887.500,00		6.199.081.875,00		6.509.035.969,00		6.834.487.767,00		7.176.212.156,00		
Promosi dan Sosialisasi Bina Keluarga Balita (BKB)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12	12	5.903.887.500,00	12	6.199.081.875,00	12	6.509.035.969,00	12	6.834.487.767,00	12	7.176.212.156,00		
	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12	12		12		12		12		12			
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				2.811.375.000,00		2.951.943.750,00		3.099.540.938,00		3.254.517.984,00		3.417.243.884,00		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12	12	2.811.375.000,00	12	2.951.943.750,00	12	3.099.540.938,00	12	3.254.517.984,00	12	3.417.243.884,00		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				3.092.512.500,00		3.247.138.125,00		3.409.495.031,00		3.579.969.783,00		3.758.968.272,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12	12	3.092.512.500,00	12	3.247.138.125,00	12	3.409.495.031,00	12	3.579.969.783,00	12	3.758.968.272,00		
Terwujudnya Edukasi Keluarga yang memiliki Remaja	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)	84.09	86.44	420.500.000,00	87.48	441.525.000,00	88.44	463.601.250,00	89.33	486.781.313,00	90.44	511.120.378,00		
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2.053.502.000,00		2.156.177.100,00		2.263.985.955,00		2.377.185.255,00		2.496.044.515,00		
Promosi, Sosialisasi dan Konseling Kesehatan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	12	420.500.000,00	12	441.525.000,00	12	463.601.250,00	12	486.781.313,00	12	511.120.378,00		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				420.500.000,00		441.525.000,00		463.601.250,00		486.781.313,00		511.120.378,00		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	12	420.500.000,00	12	441.525.000,00	12	463.601.250,00	12	486.781.313,00	12	511.120.378,00		

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya kelahiran Pasangan Usia Subur pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	
			2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
			2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
			2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
2.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan KB	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
			2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
			2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB	
			2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
3.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terwujudnya Edukasi Keluarga yang memiliki Remaja	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya Pengetahuan Orang Tua dalam Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Lansia	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Lansia	2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
		Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
		Terwujudnya Edukasi Keluarga yang memiliki Remaja	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
		Meningkatnya Pengetahuan Orang Tua dalam Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
		Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
		Meningkatnya Pengetahuan Orang Tua dalam Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
2.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	1,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
3.	Persentase keluarga mandiri	%	51,52	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,06	

Berdasarkan matrik yang tertera diatas, dapat dijelaskan bahwa apa yang muncul di dalam perencanaan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan hasil review dari isu-isu strategis terkait dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang diakomodir dalam matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur pada setiap tahunnya. Dengan harapan apa yang akan dilakukan, sasaran dan targetnya dapat terpenuhi, sehingga tujuan dan sasaran dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat terwujud.

Melihat beberapa indikator diatas dapat kita jabarkan bahwa untuk urusan Pengendalian Penduduk berfokus pada upaya menekan jumlah angka kelahiran melalui program KB dan untuk urusan Keluarga Berencana berfokus pada prevalensi pemakaian alat kontrasepsi. Indikator tersebut memberikan gambaran bahwa perencanaan kinerja yang dilaksanakan telah berbasis kepada isu strategis dan telah berbasis pada kinerja.

1.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada BAB sebelumnya, bahwa Indikator kinerja difungsikan sebagai alat ukur yang menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengukur urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun Indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan tujuan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	negatif	Rata-rata Anak per Wanita	1,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
3.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	positif	Persentase	73,82	80,06	80,07	80,08	80,09	80,10	80,11	
4.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	negatif	%	6,42	10,10	10,00	9,90	9,80	9,70	9,60	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001